



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BONE

TAHUN 2018

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima atau tahun terakhir dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

---

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 7 (tujuh ) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai disebabkan penyajian data dari instansi terkait tidak memiliki data yang dikeluarkan sehingga berdampak kepada pengukuran realisasi indikator sasaran. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 17 Februari 2018

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak

**Hj. A. NURMALIA, SH., MH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c  
Nip. 19661003 199103 2 011

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
struktur organisasi	6
isu strategis	9
inovasi pelayanan publik	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	10
Rencana Strategis	10
Visi dan Misi	10
Tujuan dan Indikator Kinerja	12
Sasaran dan Indikator Kinerja	18
Program untuk Pencapaian Sasaran	19
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	20
Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
Rencana Anggaran Tahun 2018	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	25
Capaian Kinerja Organisasi	25

---

Capaian Indikator Kinerja Utama 2018 .....	26
Perbandingan Capaian Kinerja .....	28
Realisasi Anggaran .....	37
 <b>BAB IV PENUTUP</b> .....	 40
 <b>LAMPIRAN</b>	

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

---

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BONE**

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 69 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas



---

koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
  - d. pengelolaan urusan kepegawaian/ASN; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - d. pelaksanaan administrasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
  - b. pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak;

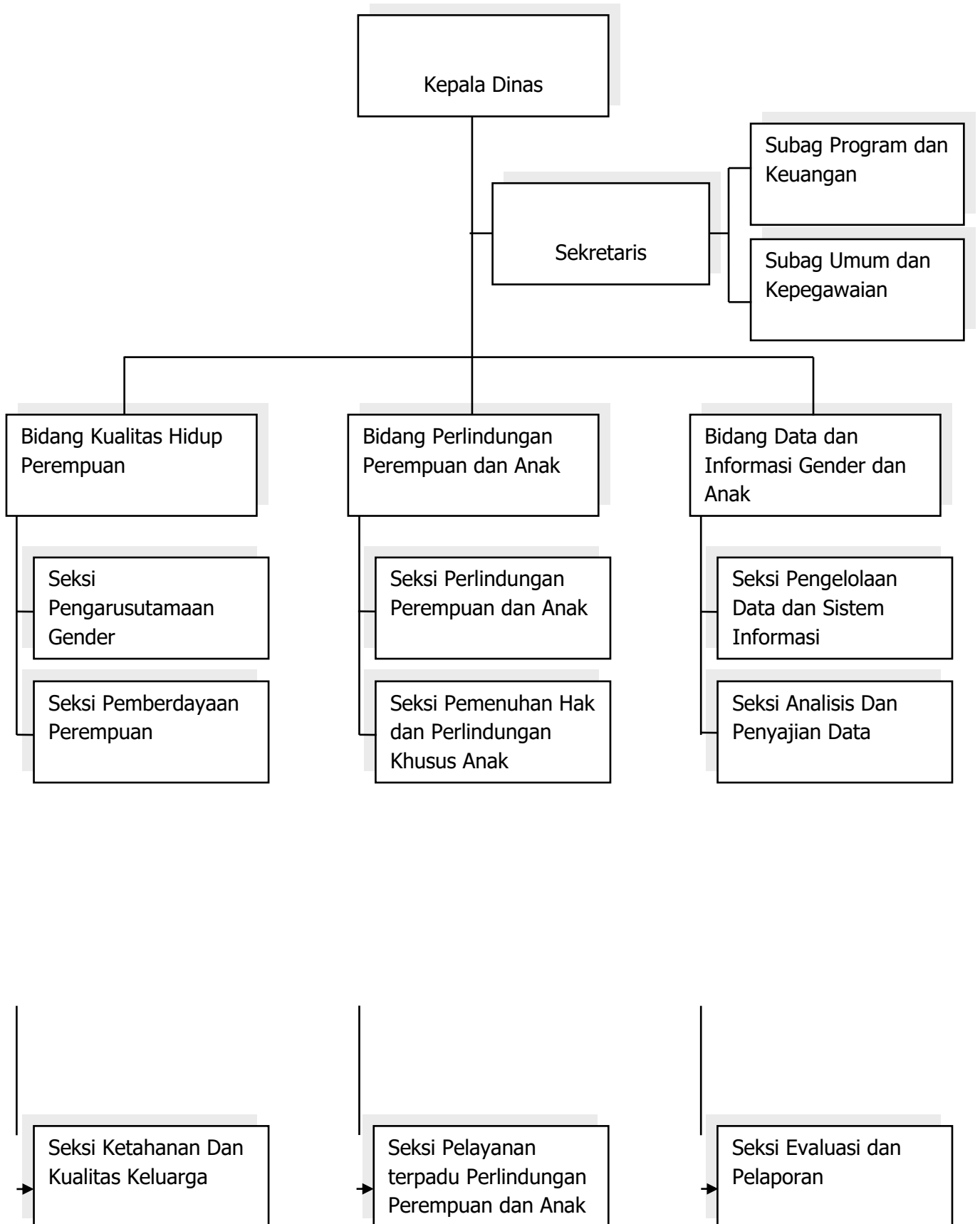
- 
- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
  - d. penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
  - e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
  - f. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
  - g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
  - h. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
  - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota;
  - j. pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
  - (2) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
    - b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
    - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
    - d. pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak;
    - e. pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak;

- 
- f. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :



Susunan kepegawaian dan jumlah personil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone didukung oleh 25 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	1	-	-	2
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	1	9	4	3	17
5	S2	1	5			6
	Jumlah	3	15	4	3	25

Dari jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan pegawai berdasarkan pendidikan yaitu sarjana PNS dan Non PNS sebanyak 17 orang dan Strata 2 sebanyak 6 orang. Masih sangat membutuhkan pegawai dilihat dari struktur organisasi Dinas PP dan PA khususnya di Bidang Kesekretariatan yakni Kasubag Program dan Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian masih merangkap dua jenis kegiatan yang berbeda sehingga dalam hal penyelesaian tugas dan fungsinya sangat berat, dengan melihat spesifikasi dan status pendidikan terakhir minimal S-I dan memiliki integritas yang tinggi.

---

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	1	2
2	Golongan III	1	8	9
3	Golongan IV	1	6	7

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

1. Belum optimalnya dukungan administrasi, sarana prasarana dan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan kualitas keluarga.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5. Rendahnya ketersediaan data pilah gender dan anak.

#### 1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bone Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah kegiatan Tudang Sipulung Anak / Musrenbang Anak dimana dalam kegiatan ini melibatkan anak dalam menjaring gagasan, ide dan masukan

---

anak terhadap akses pembangunan di daerah yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang baik tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2018 Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

##### 2.1.1 VISI :

Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan sebagai pengarah bagi stakeholder untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013 – 2018 disusun dengan mendasarkan pada visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana telah disebarluaskan kepada masyarakat dalam kampanye yang akan dipenuhi selama periode kepemimpinannya. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013 – 2018 adalah:

#### **“Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”**

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa (pembentuk kalimat), dengan arti masing-masing sebagai berikut :

1. **Sehat**, mengandung makna meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.



2. **Cerdas**, mengandung makna terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
3. **Sejahtera**, mengandung makna masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **2.1.2 MISI:**

Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

#### **Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok-Pokok Visi**

<b>NO</b>	<b>RUMUSAN MISI</b>	<b>POKOK-POKOK VISI</b>
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.	Sehat
2.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.	Cerdas
3.	Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.	Sejahtera
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan	Sejahtera
5.	Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

6.	Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.	Sejahtera
----	--------------------------------------------------------------------	-----------

### 2.1.3 TUJUAN DAN INDKATOR KINERJA

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013-2018). Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 5 tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone sebagai berikut, Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

#### Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

##### Kabupaten Bone

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata</b>	1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	a. Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata.
		b. Tersebar nya tenaga medis terlatih dan responsif gender
		c. Terjalin nya Hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan
		d. Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan marginal
	2.Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular	e. Meningkat nya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
		f. Berkurangnya angka kesakitan

Misi	Tujuan	Sasaran
		dan kematian akibat penyakit
	3. Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi masyarakat	g. Berkurangnya angka kematian ibu, bayi dan balita
		h. Meningkatnya status gizi masyarakat.
	4. Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat	i. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi
	5. Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk.	j. Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.
<b>Misi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri</b>		k. Meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi.
	1. Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera	a. Meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang makin setara dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
		b. Meningkatnya kualitas pendidikan yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya
	2. Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat	c. Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan
<b>Misi 3 : Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan</b>	3. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	d. Meningkatnya prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta jiwa kewirausahaan pemuda.
	1. Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran	a. Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional.
		b. Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
		c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata daerah
		d. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkembang dan bertambahnya jumlah wirausahawan baru.
		e. Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat.
		f. Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang yang jumlah tenaga kerja yang terserap

Misi	Tujuan	Sasaran
	2. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan	g. Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri
		h. Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan
		i. Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya.
		j. Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan.
		k. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman.
	3. Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian hutan dan lingkungan hidup.	l. Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal.
		m. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan terselesaikannya Konflik-Konflik Pertanahan
		n. Berkurangnya hutan dan lahan kritis, serta bertambahnya luas hutan rakyat.
		o. Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara, dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air.
		p. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan
		q. Berkurangnya Penambangan Tanpa Ijin (PETI), meningkatnya rumah tangga berlistrik, dan meningkatnya pemanfaatan energi alternatif
	4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	r. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan berkondisi baik
		s. Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi.
		t. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri.

Misi	Tujuan	Sasaran
		u. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem jaringan transportasi.
		v. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
		w. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan keluarga memiliki sarana air bersih dan sanitasi.
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan</b>	1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlindungan sosial.	a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil.
		b. Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	c. Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa
		d. Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
		e. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan.
		f. Meningkatnya rasa aman, nyaman transmigran di Lokasi Pemukiman Transmigrasi.
<b>Misi 5 : Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.</b>	Meningkatkan apresiasi seni dan budaya di kalangan lembaga pendidikan dan masyarakat.	Meningkatnya penyelenggaraan event-even seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah.
<b>Misi 6 : Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN</b>	1. Meningkatkan partisipasi politik dan kondusifitas lingkungan masyarakat.	a. Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela negara.
	2. Menerapkan prinsip-	b. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat. c. Meningkatnya pendapatan asli

Misi	Tujuan	Sasaran
	prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel	daerah dan meningkatnya status audit keuangan daerah oleh BPK.
		d. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
		e. Terjalinnnya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnnya kerjasama antar pemerintah daerah.
		f. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku
		g. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan
		h. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
	3. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung data statistik.	i. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaan-perencanaan normatif lainnya sesuai kebutuhan.
		j. Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang valid dan <i>up to date</i> sesuai kebutuhan.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel.2.1**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone**

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tujuan 1.  Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	13,33	13,33
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	91,95
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	-	62,49
	Rasio KDRT	%	0,19	0,19
	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	100	100
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	skor	450	600
Tujuan 2.  Meningkatkan Akuntabilitas urusan	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	c	cc

---

Dinas PP dan PA				
-----------------	--	--	--	--

#### 2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

##### Tujuan 1.

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.

##### Tujuan 2.

Meningkatkan akuntabilitas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran :

1. Meningkatkan Akuntabilitas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mengukur tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran dimana dalam sasaran tersebut ditetapkan indikator sasaran sebagai tolok ukur , Seperti tabel yang ditampilkan berikut :



**Tabel.2.2**

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak kabupaten Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Sasaran 1.  Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	13,33	13,33
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	91,95
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	-	62,49
Sasaran 2.  Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,19	0,19
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	450	600
Sasaran 3.  Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	C	CC

---

## **2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel.2.3**

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1.  Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak
Sasaran 2.  Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran 3.  Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA.	Program pelayanan administrasi perkantoran
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
	Program penunjang pemerintahan umum

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan PK seperti tabel berikut ini :

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Sasaran 1.  Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	13,33
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,95
Sasaran 2.  Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,49
	Rasio KDRT	%	0,19
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	100
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	600
Sasaran 3.  Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA.	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	CC

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut:

**Tabel.2.4**

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1.  Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	$\frac{\text{Jml. Kursi DPRD yg Diduduki Perempuan}}{\text{Jumlah total kursi DPRD}} \times 100$	DPPPA
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks		BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		BPS
Sasaran 2.  Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	$\frac{\text{Jml. KDRT}}{\text{Jml. Rumah tangga}} \times 100 \%$	DPPPA
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	$\frac{\text{Jml. Pengaduan korban Kekerasan yang tertangani}}{\text{Jml. Seluruh korban Kekerasan yang terdata}} \times 100\%$	DPPPA
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	$\frac{\text{Jml. Anak korban kekerasan}}{\text{Jml. Seluruh korban Kekerasan anak yang terdata}} \times 100\%$	DPPPA
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	Skor capaian kabupaten layak anak	DPPPA

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.137.079.119 yang

digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### Rencana Belanja Dinas PP dan PA Tahun 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.287.079.119.00	41,02
2	Belanja Langsung	1.850.000.000.00	58,97
<b>Jumlah</b>		<b>3.137.079.119.00</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung langsung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.5**

#### Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	211.391.000.00	45,64
	Indeks pembangunan Gender (IPG)		Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	64.198.000.00	13,86
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Evaluasi pelaksanaan PUG	21.496.000.00	4,64
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan	Rasio KDRT		Pengembangan sistem informasi Gender dan anak	19.042.000.00	4,11
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	81.407.000.00	17,57

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
anak	TPPO yang tertangani sesuai standar				
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar		Pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG	65.583.000.00	14,16
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Revitalisasi panduan pembinaan gerakan sayang ibu	188.508.000.00	44,01
			Fasilitasi pembentukan forum anak	84.404.000.00	19,70
			Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak- hak dasar anak	155.352.000.00	36,27
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	150.000.000.00	58,69
			Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	0	0
			Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	105.538.500.00	41,30
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	Peningkatan kapasitas peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik.	45.923.000.00	100
Sasaran. 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA	Predikat SAKIP oleh APIP	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5.448.000.00	1,23
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	98.718.600.00	22,34
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000.00	2,26
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.	262.695.000.00	59,46
			Pelaksanaan administrasi perkantoran	64.934.500.00	14,69
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.500.000.00	2,92
			Pengadaan peralatan gedung kantor	98.000.000.00	52,19
			Pengadaan Meubeleur	34.000.000.00	18,10
			Pemeliharaan	42.044.400.00	22,39

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			rutin/berkala kendaraan dinas operasional		
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.000.000.00	0,53
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.200.000.00	3,83
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.351.000.00	70,06
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.266.000.00	29,93

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 1.850.000.000 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1, 2 dan sasaran 3 adalah 58,97 %. Berdasarkan data tabel tersebut diketahui bahwa program yang mendukung sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga ) program wajib dan 3 (tiga) program rutin, selanjutnya untuk mendukung capaian sasaran tersebut terdapat 13 (Tiga Belas) kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung ke tiga program yang ada. Dan tiga belas kegiatan rutin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.



---

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 8 (Delapan) indikator sasaran.

---

**Tabel 3.2****Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Daerah (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3	BS = C =	B = 1 K = 2	SK =
2.	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	4	BS = 2 C =	B = 2 K =	SK =
3.	Meningkatnya akuntabilitas urusan Dinas PP dan PA	1	BS = C = 1	B = K =	SK =

**1.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja DPPPA Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	17,77	17,77	100
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,95	-	-
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,49	-	-
2	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Rasio KDRT	0,19	0,19	100
		Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	100	100	100
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	100	100	100
		Tingkat capaian kabupaten layak anak	450	600	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA	Predikat SAKIP oleh APIP	C	CC	CC

Dari 3 (tiga) sasaran dengan 8 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel. 3.3**

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
<b>Sasaran 1 terdapat 3 (tiga) indikator sasaran</b>			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100
3.	Cukup		
4.	Kurang	2	100
5.	Sangat Kurang		
	<b>Jumlah</b>		
<b>Sasaran 2 terdapat 4 (Empat) indikator sasaran</b>			
1.	Baik Sekali	2	100
2.	Baik	2	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
<b>Sasaran 3 terdapat 1 (satu) indikator sasaran</b>			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (Tiga) sasaran dengan 8(delapan) indikator kinerja, diketahui bahwa 8 (delapan ) indikator sasaran atau realisasi 100 % Baik.

Dari tabel kategori pencapaian indikator sasaran diatas dapat dilihat bahwa pada sasaran 1 terdapat 3 indikator sasaran dimana 1 sasaran mendapat kategori baik dan 2 indikator sasaran mendapatkan kategori kurang disebabkan oleh instansi yang berhak mengeluarkan data tahunan ( BPS ) tidak mengeluarkan data sehingga dalam hal capaian atau target yang telah

---

ditetapkan tidak dapat diukur apakah berhasil mencapai target atau belum dapat mencapai target tersebut.

Pada sasaran 2 terdapat 4 indikator sasaran dimana dari keempat indikator sasaran ini ada 2 indikator sasaran yang mendapatkan kategori baik, dimana indikator ini mampu menyelesaikan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kerjasama lintas sektor dan lembaga khusus yang menangani.

Selanjutnya 2 indikator yang juga mendapatkan kategori baik, dimana indikator ini mendapatkan kategori baik diakibatkan oleh target capaian diatas rata – rata target yang telah ditetapkan sekaligus adanya komitmen dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

### 1.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

#### A. Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	13,33	17,77	100
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,93	-	-
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,49	-	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Persentase partisipasi perempuan di DPRD , mencapai target yang telah ditetapkan , sedangkan indikator 2 yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan indikator 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak ada data capaian yang dapat diukur disebabkan data yang seharusnya dikeluarkan oleh BPS tidak memiliki data sehingga untuk mengukur capaian dan target yang telah ditetapkan sangat sulit di ketahui. Sehingga pada tabel diatas tidak ada data realisasi dan capaian kinerja yang dimasukkan.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1	Rasio KDRT	0,19	0,19	100
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
3	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	450	600	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Rasio KDRT, dengan capaian *baik (telah mencapai target)* yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 %, dari target 100 % dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan (Baik).

Indikator ke 2 yaitu Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar, dengan capaian baik ( telah mencapai target yang telah ditetapkan) realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 % sesuai rencana dan target yang ditetapkan dan capaian ini termasuk kategori baik. Indikator ini dapat dicapai

disebabkan beberapa faktor antara lain adalah telah tersedianya tempat pengaduan korban KDRT, kekerasan anak yang telah disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bone melalui layanan (P2TP2A) dan juga bekerjasama lintas sektor terkait termasuk pihak kepolisian kejaksaan, pengadilan dalam hal penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak.

Indikator ke 3 yaitu Persentase anak korban kekerasan yang tertanganai sesuai standar. Capaian dari indikator ini dari target yang telah ditetapkan dan mencapai target 100 % begitupun capaian kinerja yang dicapai 100 % artinya dari indikator ini telah mencapai harapan yang diinginkan dimana keberhasilan ini dicapai berkat kegiatan – kegiatan sosialisasi guna memberikan perlindungan terhadap anak sesuai Undang- Undang Nomor 23 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak. Selanjutnya pelibatan stakeholder dilevel Kabupaten, Kecamatan Desa Dan Kelurahan Se Kabupaten Bone.

Selanjutnya indikator ke 4 yaitu Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak pada indiktaor ini yang hendak dicapai adalah terlaksananya penilaian kabupaten/kota layak anak dimana Kabupaten Bone meraih prestasi Kabupaten layak Anak tingkat Pratama. Dengan skor 600- 700 dimana targetkan dengan skor 450 , realisasi dan capaian skor yang didapatkan untuk meraih kategori pratama adalah nilai 600- 700.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Predikat SAKIP oleh APIP	C	CC	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 1 yakni Predikat SAKIP oleh APIP, dengan capaian 100 % (*Baik*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 %, dari target 100 % dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan (*Baik*).

Berdasarkan data indikator 1 yakni Predikat SAKIP oleh APIP target pada tahun 2018 adalah nilai C, tetapi realisasi yang dicapai adalah CC artinya ada peningkatan capaian / realisasi dari target yang telah ditetapkan dimana untuk mencapai nilai SAKIP yang baik OPD harus memiliki SAKIP yang baik dan berkualitas sebagai tolok ukur perencanaan yang baik.

### **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya.**

#### **Sasaran 1.**

#### **Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1.	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	13,33	13,33	13,33
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-

Indikator kinerja 1 Persentase partisipasi perempuan di DPRD. Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 masih pada posisi 13,33 % berdasarkan data dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan sampai tahun 2018 dengan asumsi bahwa pemilihan legislatif setiap 5 tahun sekali, akan tetapi ekspektasi perempuan di Kabupaten Bone telah berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Khusus indikator 2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan indikator 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) perbandingan realisasi antara tahun ini dengan tahun sebelumnya belum dapat diukur disebabkan sumber data



---

(BPS) dalam hal ini belum memiliki data yang dikeluarkan sehingga untuk membandingkannya belum bisa diukur.

## **Sasaran 2.**

### **Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Rasio KDRT	0,12	0,54	0,19
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
3	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	-	100	100

Perkembangan Realisasi capaian indikator kinerja 1 yakni Rasio KDRT berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 mencapai 0,12 % dari target 100 %, mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,54 % dimana kasus KDRT mengalami peningkatan yang signifikan dibuktikan dengan laporan yang masuk pada Unit P2TP2A Kabupaten Bone dan pada tahun 2018 mencapai 0,19 % artinya ketika dibandingkan dengan tahun 2017 ada penurunan angka kekerasan dengan persentase 0,19 %, beberapa faktor yang berpengaruh pada kekerasan pada rumah tangga ini (KDRT) antara lain banyaknya korban/ masyarakat yang mau melaporkan kekerasan ini pada unit P2TP2A Kabupaten Bone yang dulunya malu untuk melaporkan karena dianggap aib bagi keluarganya tetapi dengan adanya program kegiatan pada Dinas PP dan PA kabupaten Bone paradigma masyarakat mulai menyadari dan menerapkan ,melaksanakan pada diri, keluarga dan lingkungannya.

---

### Sasaran 3

#### Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1.	Predikat SAKIP oleh APIP	C	C	CC

Realisasi pada tahun 2018 mencapai kategori CC dari yang ditarget kategori C, dimana tahun 2016 dan tahun 2017 ditarget dengan kategori C dari capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan asumsi bahwa dokumen perencanaan pada tahun 2016/ 2017 belum mampu memiliki dokumen SAKIP yang baik dan juga belum memiliki SDM perencanaan yang baik sehingga akan berdampak pada target capaian yang ada.

#### a. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Indeks Pembangunan Gender dimana IPG dan IDG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 dimana sebagai faktor penghambat antara lain adalah pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal dan terbatasnya anggaran program untuk mendukung pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Begitupun juga indikator indeks pemberdayaan gender (IDG) solusi yang dilakukan adalah adanya komitmen kepala daerah (stakeholder) guna meningkatkan pemberdayaan perempuan disegala bidang.
2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar, permasalahan pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Bone dimana masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT, perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Solusi yang telah dilakukan adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi

terkait ( Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, Bapas dan Pengadilan tinggi ) melalui lembaga P2TP2A kabupaten Bone dibawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

**b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada analisis atas efisiensi dan penggunaan sumber daya pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bone pada tahun 2018 ini berdasarkan sasaran yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
Efisiensi atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	13,33	58,97	7,28
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-		
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-		
4	Rasio KDRT	0,19		
5	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	100		
6	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	100		
7	Tingkat capaian kabupaten layak anak	100		
8	Predikat SAKIP oleh APIP	100		
	<b>Rata – rata capaian kinerja</b>	<b>51,69</b>		

Berdasar pada data yang ditampilkan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja adalah 51,69 % dan jika disandingkan dengan hasil realisasi anggaran keuangan yaitu 58,97 % maka efisiensi penggunaan sumber daya dari 3 (tiga) sasaran yang ada adalah 7,28 % artinya efisiensi anggaran perkegiatan untuk mendorong sasaran tersebut masih dianggap baik.

### c. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel program dan kegiatan dibawah ini :

**Tabel.3.5**  
Program dan Kegiatan tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Predikat SAKIP Oleh APIP	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	100	441.796.100	23,88
		1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	5.448.000	1,23
		2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	23 org	98,718,600	22,34
		3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 thn.	10.000.000	22,26
		4. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.	80	262.695.000	59,46
		5. Pelaksanaan administrasi perkantoran.	100	64.934.500	14,69
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana</b>	100	187.744.400	18,77
		1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	1 unit	5.500.000	2.92
		2. Pengadaan peralatan gedung kantor.	8 unit	98.000.000	52.19
		3. Pengadaan Meubeleur	23 buah	34.000.000	18,10
		4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	2unit	42.044.400	22,39
		5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	4 unit	1.000.000	0.53
		6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 unit	7.200.000	3.83
2	Persentase perempuan di DPRD	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	100	255.538.500	13.81
		1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	300 org	150.000.000	58.69
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program peningkatan kualitas hidup danperlindungan perempuan dan anak.	100	428.264.000	23.14
	Indkes Pemberdayaan Gender (IDG)	1. Revitalisasi panduan pembinaan gerakan sayang ibu.	399 org	188.508.000	44.01
	3 Rasio KDRT	2. Fasilitasi pembentukan	108 org	84.404.000	19.70

		forum anak. 3. Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak- hak dasar anak.	750 org	155.352.000	36.27
	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani yang sesuai standar	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) 2. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 3. Evaluasi pelaksanaan PUG 4. Pengembangan sistem informasi gender dan anak 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 6. Pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG	100 490 org 150 org 100 1 pkt. 6 Kec. 37 OPD	463.117.000 211.391.000 64.198.000 21.496.000 19.042.000 81.407.000 65.583.000	25.03 45.64 13.86 4.64 4.11 17.57 14.16
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	100 200 Org	255.538.500 105.538.500	13.81 41.30
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1. Peningkatan kapasitas peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	100 200 Org	45.923.000 45.923.000	2.48 100

---

## 1.2 REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.137.079.119,-

#### 1. Anggaran Kinerja :

- |                          |     |                 |          |
|--------------------------|-----|-----------------|----------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.287.079.119,- | (41,02%) |
| - Belanja Langsung       | Rp. | 1.850.000.000,- | (58,91%) |

---

Jumlah	Rp.	3.137.079.119
--------	-----	---------------

### 2. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

#### 1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.287.079.119,- (41,02%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp.	1.156.671.600,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp	130.407.519,-

#### 2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (58,91%) dengan jumlah 7 program dan 26 kegiatan.

---

#### **4. Penghargaan Yang Diterima**

Penghargaan yang diterima pada tahun 2018 adalah :

1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya kepada pemerintah Kabupaten Bone oleh Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia.
2. Penghargaan kabupaten layak anak kategori Pratama tahun 2018 kepada pemerintah kabupaten Bone oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3. Piagam penghargaan dari gubernur Sulawesi Selatan sebagai kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **5. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.
2. Semakin banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.
3. Aspirasi/suara perempuan dan anak kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
4. Banyaknya perempuan sebagai kepala rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone.
5. Kurangnya keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

- 
6. Kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi gender dan penanganan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak setiap kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bone.
2. Melakukan kegiatan pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG untuk para aparat perencanaan SKPD dan para camat se Kabupaten Bone melalui pembuatan GAP, GBS dan KAK dan penyusunan Perda PUG dalam Pembangunan Daerah Nomor 11 Tahun 2017.
3. Melakukan kegiatan fasilitasi pembentukan forum anak di tingkat Kecamatan sehingga aspirasi anak dapat tersalurkan.
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan, pendidikan peran serta kesetaraan gender untuk meningkatkan kualitas produktivitas ekonomi perempuan.
5. Melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Peran dan Posisi Perempuan di Bidang politik dan Jabatan Publik.
6. Melakukan pendekatan kepada aparat penentu kebijakan agar staf/pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan ditambah mengingat beban kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada.



---

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 adalah baik, karena terdapat 10 indikator memenuhi kriteria tinggi dan 2 (dua) indikator yang tidak tercapai karena tidak dianggarkan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan disebabkan beberapa faktor antara lain dipengaruhi oleh era globalisasi dan

---

modernisasi yang juga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kontribusi perkembangan perempuan dan anak.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

---

**Lampiran-lampiran :**

1. Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya oleh Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia.
2. Piagam Penghargaan kabupaten layak anak sebagai kategori Pratama tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Bone oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
3. Piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Cascading tahun 2018



---

